



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJiP 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT , atas Rahmat, Taufik, Hidayah dan Inayah – Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan dan regulasi yang ada.

Adapun maksud dokumen LKJiP ini untuk memberikan laporan yang terkait dengan capaian kinerja dari Bappeda dan sebagai bahan evaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan capaian kinerja selama tahun 2021. Tujuan dokumen LKJiP memberikan informasi tentang perencanaan pembangunan kepada para stakeholder yang membutuhkan dan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan pada tahun mendatang.

Kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi atas terselesainya LKJiP khususnya di Bappeda. Namun disisi lain kami menyadari dari apa yang telah selesai ini masih perlu adanya masukan dan saran guna sebagai koreksi untuk perbaikan laporan mendatang.

Pasuruan, 31 Desember 2021

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PASURUAN**



Ir. IHWAN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19630203 198903 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	1
2.1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023.....	1
2.2 Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	1
3.2 Realisasi Anggaran	2
BAB IV PENUTUP.....	1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Bappeda.....	6
Tabel 2.1 Visi, Misi dan Sasaran Jangka Menengah Daerah yang berhubungan dengan Tupoksi Bappeda Kabupaten Pasuruan	2
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	2
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2021	1
Tabel 3.2 Perkembangan Capaian Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2021	2
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra	3
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional Tahun 2021	4
Tabel 3.5 Alokasi Sasaran Pembangunan Tahun 2021	4
Tabel 3.6 Pencapaiann Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	5
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) Kabupaten Pasuruan	2
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan dalam menyelenggarakan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Bappeda Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.
- (2) Bappeda Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi terkait :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaran fungsi penunjang urusan Pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.1 Sekretariat

- (1) Sekretaris sebagai Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi serta tatalaksana; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.2 Bidang Ekonomi

- (1) Bidang ekonomi sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Perekonomian Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud ayat (1), bidang ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan perencanaan umum pembangunan di bidang ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Pengelolaan koordinasi dan sinkronisasi rencana umum pembangunan bidang ekonomi;
 - c. Pengelolaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang ekonomi; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.3 Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

- (1) Bidang prasarana wilayah dan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang prasarana wilayah dan tata ruang mempunyai Fungsi:
 - a. Pengelolaan perencanaan umum pembangunan di bidang prasarana wilayah data tata ruang;
 - b. Pengelolaan koordinasi dan sinkronisasi rencana umum pembangunan bidang prasarana wilayah dan tata ruang;

- c. Pengelolaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang prasarana wilayah dan tata ruang; dan
- d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.4 Bidang Sosial Budaya

- (1) Bidang sosial budaya sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum pembangunan bidang sosial budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud ayat (1), bidang sosial budaya fungsi:
 - a. Pengelolaan penyusunan perencanaan umum di bidang sosial budaya;
 - b. Pengelolaan koordinasi dan sinkronisasi rencana umum pembangunan bidang sosial budaya;
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang sosial budaya; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

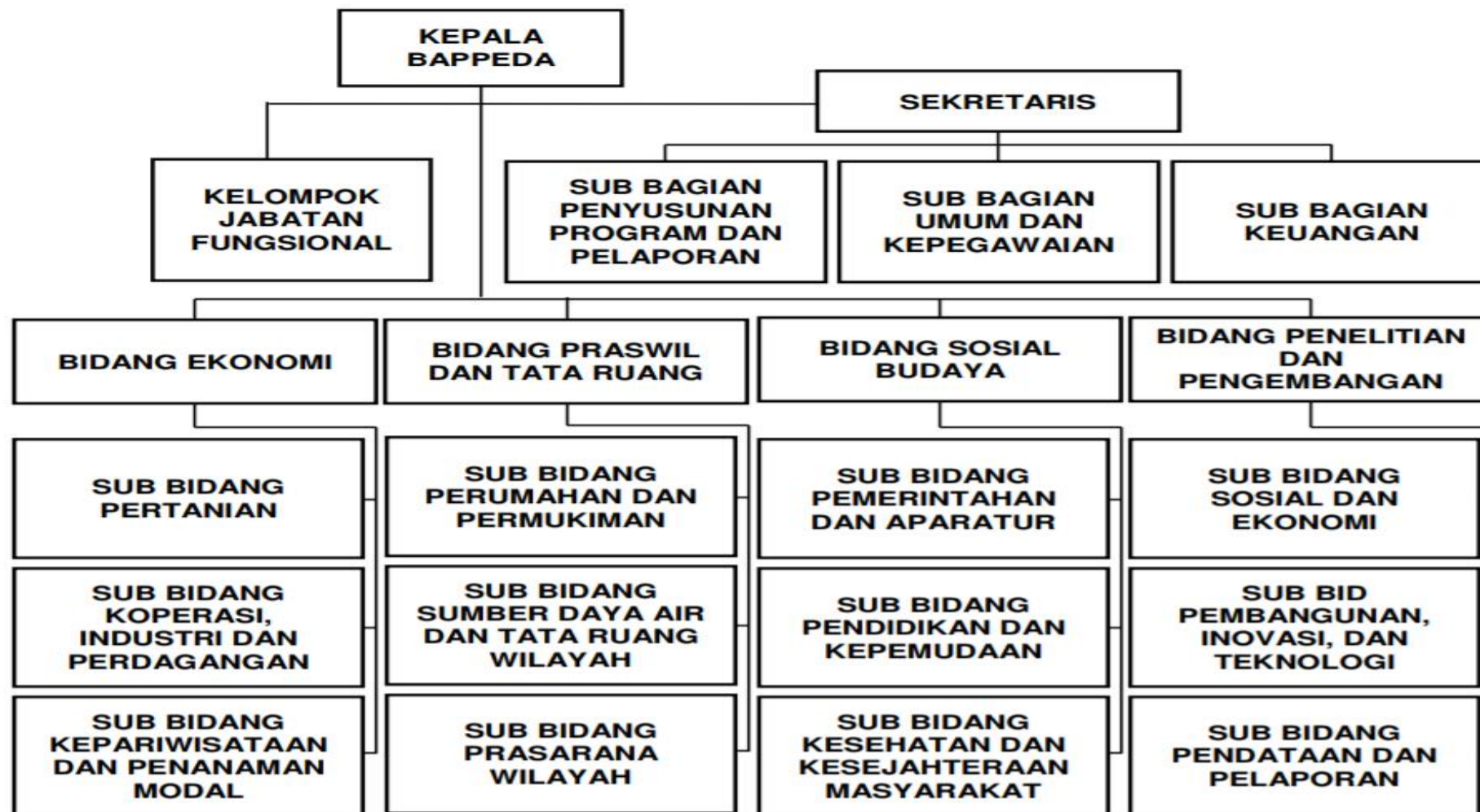
1.1.5 Bidang Penelitian dan Pengembangan

- (1) Bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum di bidang penelitian, pengembangan dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan penyusunan program kerja di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Pengelolaan penyusunan perencanaan umum di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Kerja Perangkat daerah. Bagan struktur organisasi Bappeda sebagaimana gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN



1.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Pasuruan

1.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Susunan jumlah pegawai akhir Desember Tahun 2021 Bappeda Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, dan eselon serta Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebagai berikut :

(1) Menurut golongan kepangkatan, dapat dikelompokkan menjadi :

- Golongan IV : 8 orang
- Golongan III : 22 orang
- Golongan II : 4 orang
- Golongan I : -
- Calon PNS : 3 orang
- Tenaga PTT : 2 orang

(2) Menurut tingkat pendidikan dikelompokkan menjadi :

- S-3 : 1 orang
- S-2 : 9 orang
- S-1 : 22 orang
- Diploma : -
- SMA : 7 orang
- SMP : 0 orang
- SD : -

(3) Menurut eselon dikelompokkan menjadi :

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 5 Orang
- Eselon IV : 14 orang

(4) Menurut Fungsional Perencana dikelompokkan menjadi :

- Fungsional Perencana Ahli Madya : 2 Orang
- Fungsional Perencana Ahli Muda : 1 Orang

1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja perkantoran yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda Kabupaten Pasuruan antara lain:

- 1) Bappeda menempati gedung seluas 933 m² terletak di area Komplek Perkantoran Pemkab. Pasuruan di Jl. Raya Raci – Bangil Km. 9 Raci, Bangil-Pasuruan.
- 2) Kendaraan dinas operasional sebanyak 19 unit dengan rincian sebagai berikut :
 - Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 9 unit dalam kondisi baik
 - Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 10 unit dalam kondisi baik

- Peralatan penunjang kerja : laptop, personal computer, printer, telepon, jaringan internet dalam jumlah cukup dan kondisi baik.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Bappeda Kabupaten Pasuruan.

1.3 Potensi dan Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pasuruan

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Pasuruan diukur melalui Indikator Kinerja Utama untuk mendukung sasaran strategis sebagaimana Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Bappeda
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik
	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Susai Ketentuan
Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah dilakukan dengan asistensi langsung dari Kemenpan & RB. Pelayanan Bappeda dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis organisasi yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Potensi dan masalah diuraikan berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Pelayanan Perencanaan :

- 1) Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik
2. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan

2) Potensi Tenaga

- Terdapat Fungsional Perencana diangkat dibulan Agustus Tahun 2020 yang membantu pelaksanaan penyusunan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah;
- Tersedia Klinik Perencanaan sebagai layanan bagi perangkat daerah melakukan konsultasi tentang perencanaan perangkat daerah.

3) Masalah :

- Struktur Organisasi terbentuk pada akhir bulan Desember Tahun 2021 sehingga bidang perencanaan , pengendalian dan evaluasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Oleh karena itu kegiatan penyusunan perencanaan daerah ditentukan oleh Kepala Bappeda secara mandataris diberikan kepada Bidang Ekonomi (untuk menyusun RKPD Tahun 2022) dan kepada Bidang Praswil dan Tata Ruang (untuk Reviu RPJMD);
- Pembentukan regulasi dari pemerintah pusat yang berpengaruh pada progres dan substansi dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah (antara lain Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan penerapan aplikasi SIPD bagi semua pemerintah daerah).
- Penyederhanaan Birokrasi yang terlaksana pada akhir bulan Bulan Desember 2021, dimana pejabat eselon IV beralih menjadi Fungsional Perencana Ahli Muda.

Pelayanan Kelitbangan :

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah

Indikator Kinerja Utama : Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti

1) Potensi :

- Masih tersedia anggaran untuk kegiatan Litbang untuk mendukung pengukuran IKU daerah yaitu indeks Williamson yang dan indeks kesalehan sosial.

- Terdapat Tim Percepatan Realisasi Fokus Pembangunan (PERFORP) Daerah yang mendukung Kegiatan Kelitbangan antara lain menyusun kebijakan strategis pembangunan daerah, IPTEK tahun 2019-2023 (Perbup Nomor 3 Tahun 2020)

2) Masalah :

- Belum tersedia tenaga fungsional peneliti sehingga pelaksanaan semua kegiatan kelitbangan dilingkungan dengan perguruan tinggi negeri;
- Recofusing anggaran tahun 2021 untuk penanganan dampak Covid-19, beberapa kegiatan litbang yang tidak dilaksanakan antara lain pelaksanaan lomba inovasi

2) Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

(1) Potensi :

- Penilaian SAKIP Perangkat Daerah untuk capaian Target sesuai akhir renstra yaitu nilai 85
- Diharapkan agar kualitas dokumen SAKIP bertambah menjadi baik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat pada lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023

Dokumen Renstra adalah merupakan instrument atau sebagai acuan untuk mewujudkan Bappeda Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD, sebagaimana Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Daerah yang berhubungan dengan TUPOKSI Bappeda Kabupaten Pasuruan

Visi Misi RPJMD	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Visi : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat, Dan Berdaya Saing							
Misi :							
1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat							
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial							
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan							
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif,	TUJUAN 4.1 Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	NILAI SAKIP	79,00 (BB)	80,00 (BB)	81,00 (A)	85,00 (A)	89,00 (A)

akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi	Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas Sistem Keuangan Daerah	OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran 4.1.3 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	IKM	82,50 (Baik)	83,00 (Baik)	83,50 (Baik)	84,00 (Baik)	84,50 (Baik)
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman, dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan							

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan janji kinerja yang menetapkan target yang harus dicapai pada akhir tahun anggaran. Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun dan perubahan di Bulan November, terdapat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
1	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.	1.1	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	%	91
		1.2	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	%	100
2	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	2.1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	3.1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	skor	83

Secara lengkap dokumen perjanjian kinerja eselon II sebagaimana terlampir :



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. IHWAN, M.Si.**

Jabatan : **KEPALA BAPPEDA KAB. PASURUAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.**

Jabatan : **BUPATI PASURUAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 2 November 2021

PIHAK KEDUA

H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

PIHAK PERTAMA

Ir. IHWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630203 198903 1 015

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD		83
2	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik.	Persen	91
		Persentase Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Persen	100
3	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Persen	100

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.612.998.056	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.236.266.100	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.973.988.650	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.095.909.900	APBD
	TOTAL	12.919.162.706	APBD

PIHAK KEDUA


H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.

Pasuruan, 2 November 2021

PIHAK PERTAMA


Ir. IHWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19630203 198903 1 015

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada dasarnya akuntabilitas kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hasil pengukuran tersebut memberi gambaran tercapai/tidaknya target beserta penjelasan yang cukup memadai, sebagai bahan evaluasi kinerja tahun berikutnya.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Pasuruan di tahun 2021 dapat digambarkan melalui Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2021
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.	1.1	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	%	91	94,64	104
		1.2	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	%	100	100	100
2	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	2.1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	3.1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	skor	83	83,48	100,57

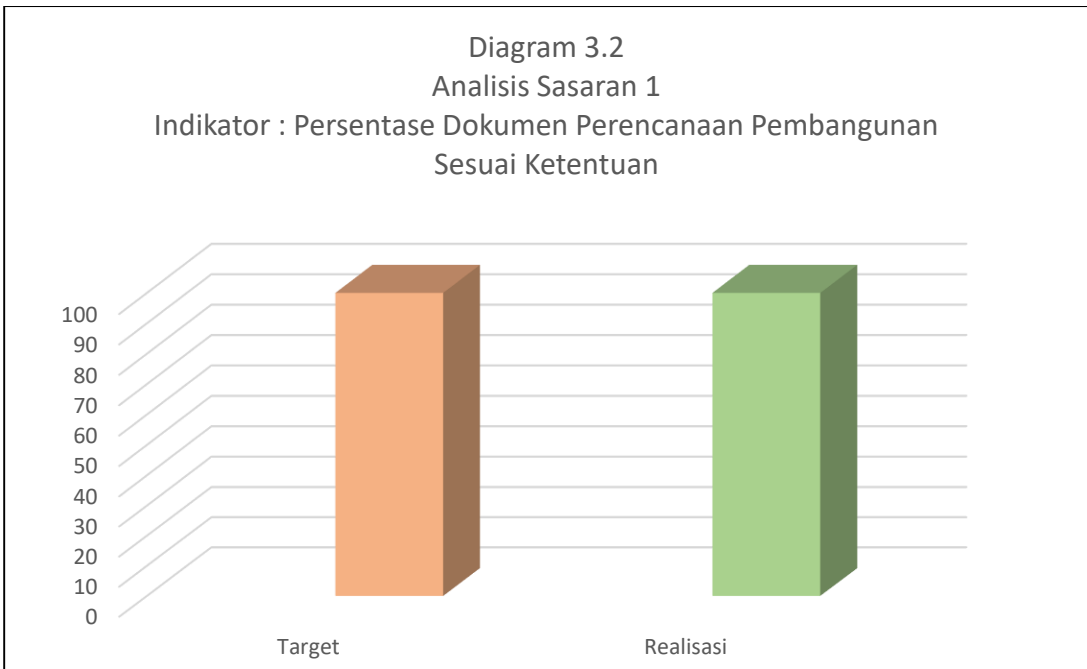
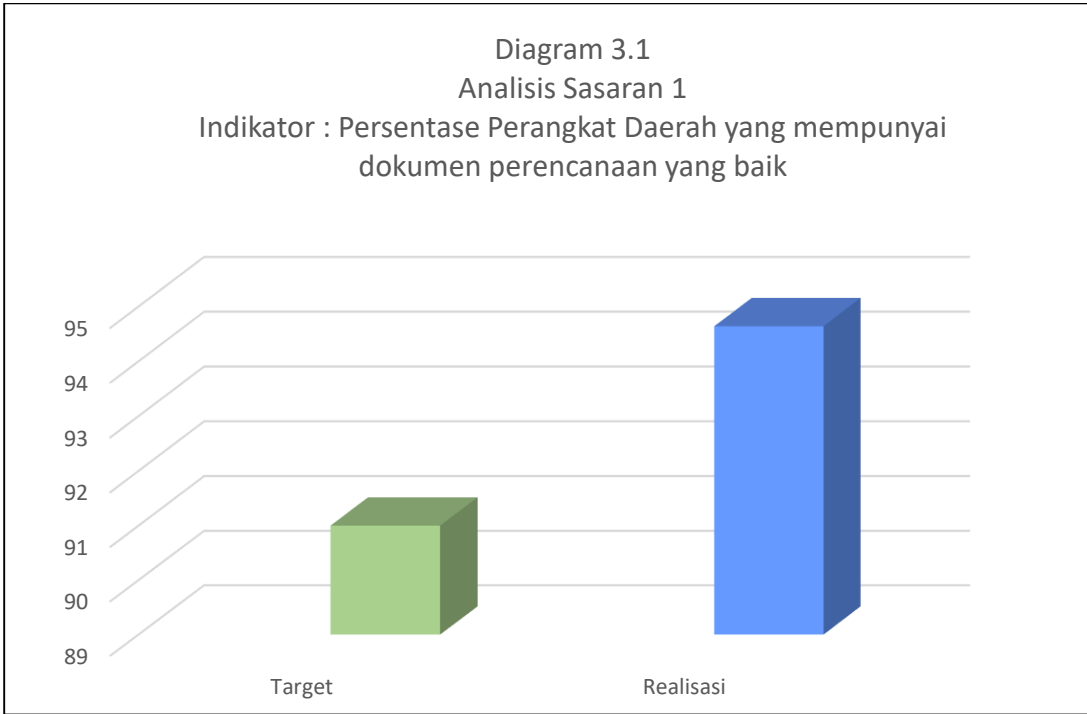
Capaian Indikator Kinerja Utama pada tabel 3.1 Bappeda pada tahun 2021 menjelaskan secara keseluruhan telah sepenuhnya mencapai target yang ditentukan, khususnya pada indikator Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik sebesar 91%.

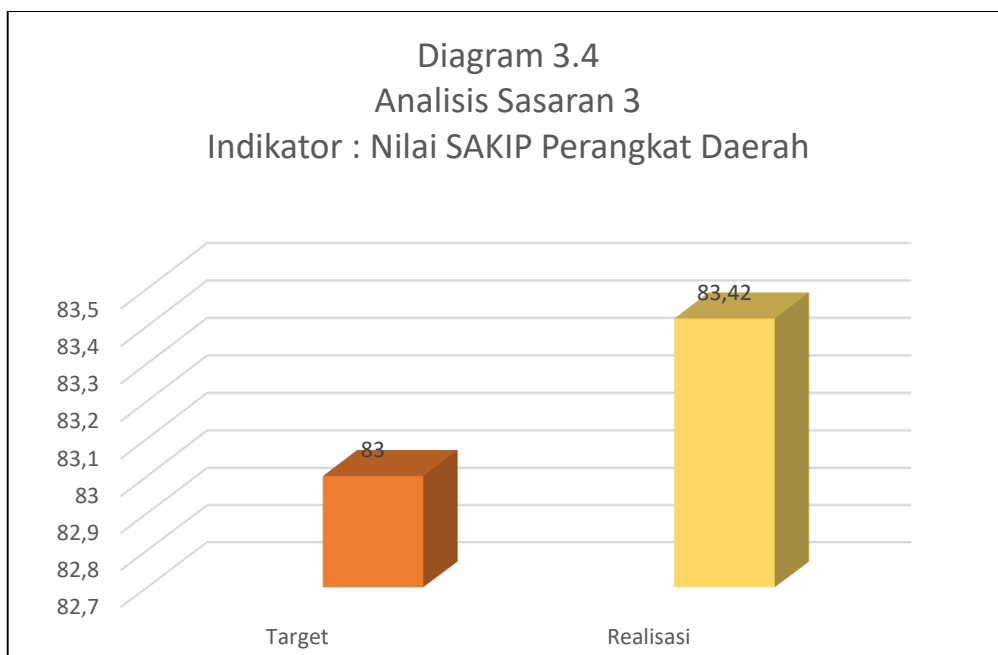
Terealisasi capaiannya dari target tersebut, sebesar 94,64% atau 104 %, Indikator Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan sesuai Ketentuan dengan target sebesar 100% dengan capaian 100%. Sedangkan Indikator kinerja Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti, pada indikator ini berhasil 100%, yaitu dari target yang ditentukan sebesar 100 % realisasi 100%. Tercapainya target pada indikator kinerja ini tidak lepas dari tingkat pemahaman OPD untuk melakukan kegiatan perencanaan yang sesuai dengan regulasi yang ada.

Tabel 3.2
Perkembangan Capaian Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	%	88	89	91	94,64
	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	%	-	-	100	100
2	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	80	100	100	100
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah	%	80	81,48	83	83,48

Perkembangan Capaian Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tabel 3.2 diatas dapat dianalisis pada masing-masing sasaran dapat dilihat pada diagram 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 berikut ini:





Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Kemajuan (%)
1	2		3	5
Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	100	94,64	4%
	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	100	100	100
Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100	100	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	83	83.48	0,77%

Pada Tabel 3.3 diatas pada dasarnya dalam pembahasan sama dengan Tabel 3.1. yaitu target akhir di Renstra dan tingkat kemajuan untuk indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik yaitu 94,64 %, Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sebesar 100%, sedangkan Meningkatnya nilai SAKIP sebesar 100,577%. Pada tabel 3.4 tentang perbandingan dan realisasi kinerja dan realisasi nasional. Untuk Bappeda terkait hal ini nihil

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Ket.
		Th. 2021	Nasional	(+/-)
1	2	3	4	5
Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	94,64	n/a	

	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	100		
Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100	n/a	

Alokasi anggaran berdasarkan Sasaran Strategis dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Alokasi Sasaran Pembangunan
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	1.973.988.650	84.51%
		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	1.236.266.100	94%
2	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	2.095.909.900	15.49%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	7.612.998.056	96%
TOTAL			12.919.162.706	100%

3.2. Realisasi Anggaran

Pada table 3.6 Dijelaskan tentang alokasi Sasaran Pembangunan yang terdapat pada sasaran strategis dan Indkator kenerja. Tahun 2021 anggaran belanja langsung sebesar Rp. 12.919.162.706,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.407.132.070,- atau sebesar 96% dengan rincian tersebar pada semua sarana strategis.

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran tahun 2021

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Anggaran (Rp.)			Kinerja		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PERENCANAAN								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi	%	7.612.998.056	7.282.655.868	95,66	100	100	100
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah	dok	140.282.900	126.318.450	90,05	8	8	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan daerah yang disusun	dok	10.620.400	10.237.500	96,39	5	4	80
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	104.555.300	96.906.550	92,68	2	2	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah	dokumen	25.107.200	19.174.400	76,37	1	2	200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	%	5.553.164.006	5.387.278.784	97,01	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	5.258.364.006	5.112.078.784	97,22	532	532	100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai dengan Perikatan yang dibayarkan honorariumnya	orang/bulan	294.800.000	275.200.000	93,35	144	144	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kendaraan yang diasuransikan pada Perangkat Daerah	%	22.500.000	21.834.478	97,04	100	100	100
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan pada SKPD yang diasuransikan	unit	22.500.000	21.834.478	97,04	7	7	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	%	-	-		100	100	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur/ASN yang mengikuti Bintek, PKS, Sosialisasi		-	-		20	0	0

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	%	583.796.780	558.806.939	95,72	100	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	unit	19.242.410	19.082.250	99,17	20	20	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis-kali	41.146.800	40.872.400	99,33	46	46	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	jenis-kali	102.379.070	88.769.000	86,71	25	25	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan perundang-undangan	eksemplar	14.195.200	12.182.500	85,82	168	168	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan untuk kunjungan tamu	laporan	-	-		15	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	laporan	351.333.300	342.400.789	97,46	45	45	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	m/linier	55.500.000	55.500.000	100,00	50	90	180
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	%	654.917.670	651.087.800	99,42	100	100	100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	unit	427.200.000	427.200.000	100,00	1	1	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	227.717.670	223.887.800	98,32	23	23	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang	%	296.808.300	216.412.137	72,91	100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	surat	156.228.300	112.322.137	71,90	96	408	425
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan	rekening	140.580.000	104.090.000	74,04	48	48	100

	pelaku pengadaan barang/jasa							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	%	361.528.400	320.917.280	88,77	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	257.858.200	230.346.080	89,33	35	35	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	22.317.500	13.628.200	61,07	26	26	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	81.352.700	76.943.000	94,58	83	83	100
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	%	1.236.266.100	1.216.547.691	98,41	100	100	100
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	dok	838.009.100	821.687.650	98,05	28	28	100
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen Berita Acara hasil konsultasi publik	dokumen	50.010.000	46.421.000	92,82	1	1	100
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang kabupaten/Kota	dokumen	180.170.500	174.351.050	96,77	1	1	100
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyiapan bahan musrenbang kecamatan	dokumen	27.834.700	23.385.100	84,01	24	24	100

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen perda/perbup rencana pembangunan daerah	dokumen	579.993.900	577.530.500	99,58	2	2	100
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi	dokumen	25.539.000	25.397.000	99,44	100	100	100
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	dokumen	25.539.000	25.397.000	99,44	1	1	100
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi	dokumen	372.718.000	369.463.041	99,13	100	1	1
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	dokumen	372.718.000	369.463.041	99,13	1	1	100
POGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang baik	%				92,68	92,68	100
	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang baik	%				89	89	100
	Persentase Perangkat Daerah Bidang Prasarana Wilayah yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang baik	%				83	83	100
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, Asistensi dan Monev bidang Sosial Budaya	dok	398.890.400	367.811.411	92,21	92	92	100

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan bidang pembangunan manusia	dokumen	145.670.100	144.678.500	99,32	1	1	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan hasil koordinasi bidang Pemerintahan	laporan	70.832.300	63.607.230	89,80	12	12	100
	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	dokumen				31	31	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan hasil koordinasi bidang Pembangunan Manusia	laporan	85.925.400	73.640.551	85,70	24	24	100
	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	dokumen				8	8	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	laporan	96.462.600	85.885.130	89,03	16	12	75
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase perangkat daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	dokumen	352.486.600	307.384.922	87,20	30	30	100
	Jumlah dokumen sektoral	dokumen				1	1	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan perencanaan PD bidang perekonomian	dokumen	4.678.800	2.511.000	53,67	6	6	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil asistensi penyusunan perencanaan pembangunan PD bidang SDA	dokumen	-	-		3	3	100

Perangkat Daerah Bidang SDA								
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian (pariwisata)	dokumen	217.728.700	212.740.600	97,71	1	4	400
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang perekonomian yang Baik	dokumen	79.429.500	56.088.822	70,61	6	6	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA yang Baik	dokumen	50.649.600	36.044.500	71,16	3	3	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil monev penyusunan perencanaan PD bidang Perekonomian	laporan						
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil monev penyusunan perencanaan PD bidang SDA	laporan	-	-				
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, Asistensi dan Monev bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen laporan	1.222.611.650	1.148.257.288	93,92	19	19	100
	Jumlah dokumen sektoral	dokumen				3	3	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi perencanaan Perangkat Daerah bidang infrastruktur	dokumen	88.943.500	87.481.332	98,36	5	5	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen hasil asistensi penyusunan dokumen	dokumen	250.000.000	245.558.200	98,22	5	5	100

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	perencanaan pembangunan bidang infrastruktur							
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur	laporan	8.707.000	8.369.350	96,12	5	5	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah bidang infrastruktur yang sesuai ketentuan (RPIJM Perkim dan RPIJM Transportasi)	laporan	49.796.700	48.068.400	96,53	2	2	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	dokumen	40.957.900	40.147.910	98,02	1	1	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen hasil asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	dokumen	14.032.250	12.260.500	87,37	1	1	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Kewilayahan	laporan	16.440.300	16.046.800	97,61	1	1	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang kewilayahan yang sesuai ketentuan (RTRW)	dokumen	753.734.000	690.324.796	91,59	3	3	100
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	2.095.909.900	2.084.474.890	99,45	100	100	100

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	dokumen	550.244.900	548.904.900	99,76	4	4	100
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	dokumen	550.244.900	548.904.900	99,76	4	4	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	dokumen	556.226.200	555.297.390	99,83	4	4	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	dokumen	556.226.200	555.297.390	99,83	4	4	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	dokumen	803.003.000	797.957.300	99,37	6	6	100
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	dokumen	803.003.000	797.957.300	99,37	6	6	100
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	dokumen	186.435.800	182.315.300	97,79	4	4	100
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	dokumen	186.435.800	182.315.300	97,79	4	4	100
			12.919.162.706	12.407.132.070	96,04			

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	91%	92.4%	7,6%
		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	100%	98.4%	1,6%
2	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100,00%	99,45%	0,55%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100%	95.6%	4,4%

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan :

Sebagaimana telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya bahwa Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah ditetapkan 4 (empat) indikator untuk mengukur pencapaian sasaran strategis

- Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang baik ;
- Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan
- Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Target yang ditetapkan pada Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang baik adalah sebesar 94.64% dan capaian hasil atas indikator tersebut terealisasi sebesar 104%, Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan sebesar 100%, indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti, ditetapkan target sebesar 100%, dan terealisasi sebesar 100% dan Nilai SAKIP PD target 83 dan terealisasi 83,42.

5.2 Rekomendasi :

Dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), perlu dilakukan upaya restrukturisasi organisasi Bappeda dengan mengubah nomenklatur nama BAPPEDA menjadi BAPPELITBANGDA karena mengampu 2 (dua) urusan yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian, selain itu perlu ditambahkan bidang RENDALEV yang berfungsi sebagai bidang yang mengurus bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Untuk upaya peningkatan kemampuan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus terus dilakukan. Metode yang digunakan untuk mendukung komitmen ini adalah melalui pengikutsertaan personil Bappeda dalam pendidikan dan latihan serta bimbingan teknis perencanaan pembangunan.

Yang tak kalah penting dan mendasar atas kebutuhan peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran strategis Bappeda adalah penambahan personil yang memadai. Kondisi faktual yang ada sekarang adalah jumlah personil di Bappeda makin menurun dan sangat tidak sebanding dengan volume pekerjaan. Hal ini terjadi karena batas usia pensiun yang sudah tercapai dan promosi jabatan yang diperoleh tidak sebanding dengan penambahan pegawai dari rekrutmen CPNS maupun mutasi internal di lingkup pemerintah daerah. Permasalahan klasik semakin menurunnya jumlah pegawai ini sebenarnya juga dialami oleh banyak organisasi perangkat daerah lainnya. Namun yang membedakan Bappeda dengan organisasi perangkat daerah lainnya adalah tingginya target kinerja dan volume pekerjaan yang harus dicapai, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam upaya pencapaian target kinerja dimaksud.

Dari uraian kondisi yang diharapkan dan kondisi senyatanya diatas, serta dielaborasi dengan upaya solutif yang sudah dilaksanakan dan ditawarkan tersebut, maka semuanya bermuara pada perlunya komitmen yang kuat serta konsistensi, baik secara internal Bappeda maupun eksternal melalui Organisasi Perangkat Daerah penopangnya serta para stakeholder. Dengan komitmen dan konsisten dalam penyusunan perencanaan yang kuat, maka akan terwujud perencanaan yang transparan, akuntabel serta berkelanjutan.

Pasuruan, 31 Desember 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PASURUAN



Ir. IHWAN MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 19630203 198903 1 015